

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP.

Djulaeka, dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Dyah Ochterina Susanti, dan A'an Efendi. 2020. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ecep Nurjamal. 2023. *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana*. Tasikmalaya: Edu Publisher.

Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Fahmi Tanjung. 2023. *Konstruksi pertanggung jawaban Pidana Paguyuban (analisis melalui pendekatan teori-teori korporasi)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Irfan Ardiansyah. 2017. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA.

Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia : Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.

Leden MArpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, Fauziah. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV anhaji.

Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.



- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik . 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasrullah. 2021. *Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- . 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ruba’i, Masruchin. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sandu Siyoto, dan Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Suyanto. 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigress Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1975. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarif Saddam Rivanie. 2020. *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Yahman. 2017. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group.



B. Jurnal

Ahmad Arifandi, dan Irma Yusriani Simamora. 2023. "Penerapan Etika Komunikasi di Media Sosial: Analisis Pada Grup WhatsApps Having Fun." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 125, No.1.

Ahmad Setiadi. 2016. "Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi." *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*. Vol. 16, No.2.

Al Furqon. 2018. "Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-sama." *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol. 2, No.2.

Ayu Puput Budi Kumala dan Agustin Sukmawati. 2020. "Dampak Cyberbullying Pada Remaja di Media Sosial." *Jurnal of Nursing*. Vol. 1, No.1.

Daffa Aqillah, dkk. 2023. "Dampak Media Sosial Terhadap Tindak Kenakalan Remaja." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 6, No.1.

Kartika Mariskhana. 2018. "Dampak Media Sosial (Facebook) dan Gadget Terhadap Motivasi Belajar." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. XVI, No.1.

Kariman Sinaga, dkk. 2019. "Pelatihan Meminimalisir Efek Hoaks Media Sosial di Desa Namo Sialang Kec Batang Serangan Kab Langkat-Sumut." *Jurnal Network Media*. Vol. 10, No.2.

Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari, dan Dodi Jaya Wardana,. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No.1.

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. Vol. 47, No. 3.

Pahmi Syaripudin. 2021. "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 236 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Iusticiabellen*. Vol. 1, No.1.



RB Budi Prastowo. 2006. "Delik Formil/Delik Materiil, Sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 24, No. 3.

Setyastuti Yuanita. 2012. "Aprehensi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi dan Tipe Kepribadian Ekstrovert-Introvert." *Jurnal Komunikator*. Vol. 4, No.2.

Tarigan, Victor Osmond. 2016. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 1, No.1.

C. Sumber Lainnya

Adminyl. 2021. *Penyalahgunaan Teknologi bisa Dijerat Hukum*. 19 November. Diakses Februari 8, 2024. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/11/19/penyalahgunaan-teknologi-bisa-dijerat-hukum-2/>.

Astari Clara Sari, dkk. 2018. *Komunikasi dan Media Sosial*. 04 Desember. Diakses Februari 8, 2024. KOMUNIKASI-DAN-MEDIA-SOSIAL.pdf (researchgate.net).

UMA, Magister Hukum Pascasarjana. 2022. *Tindak Pidana Pemerasan*. 25 Maret. Diakses Februari 7, 2024. <https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/ VI/ 2021).

